

LKJIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI



I Kadek Mudarta, ST., M.A.B

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Bali



(0361) 224436,227730



dishub@baliprov.go.id



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGHANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
LATAR BELAKANG.....	3
KONDISI ORGANISASI	5
ISU STRATEGIS	10
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
RENSTRA 2024-2026 DAN 2025-2029	11
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
CAPAIAN KINERJA INSTANSI	15
ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM	33
BAB IV PENUTUP	44
KESIMPULAN	44
SARAN	46
LAMPIRAN	48

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Puji Pangastuti dan Sesanti Angayubagya dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya sehingga sampai saat ini masih diberikan Kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Transportasi dan Pelayanan kepada masyarakat.

LKjIP ini disusun untuk memberikan informasi atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan Sasaran/Indikator Sasaran kinerja yang telah ditetapkan, mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan baik mengenai keberhasilan ataupun kegagalan, serta sekaligus sebagai laporan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Perhitungan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, semoga LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dijadikan parameter untuk penyusunan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS I Kadek Mudarta, ST., M.A.B Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19750218 200802 1 001
---	--

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan begitu saja. Jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali terkait Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali (RPD) Tahun 2024-2026 kemudian diharmonisasikan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yang mana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia, dimana untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan Sasaran strategis tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali
- b. Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali
- c. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

Kemudian dengan dilantiknya Gubernur Bali periode 2025-2030, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 mengalami harmonisasi menjadi Renstra Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengalami perubahan sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan dan Ramah Lingkungan

- a. Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi Provinsi Bali
- b. Menurunkan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas
- c. Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum
- d. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah
- e. Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025.

Adapun dasar hukum dalam Penyusunan LKJIP 2025 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

2. KONDISI ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

(1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangan;

b. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

c. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Angkutan Jalan;
2. Seksi Pengawasan Angkutan Jalan;

d. Bidang Pelayaran, membawahi :

1. Seksi Angkutan Pelayaran;
2. Seksi Kepelabuhanan;

e. Bidang Keterpaduan Moda, membawahi :

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025

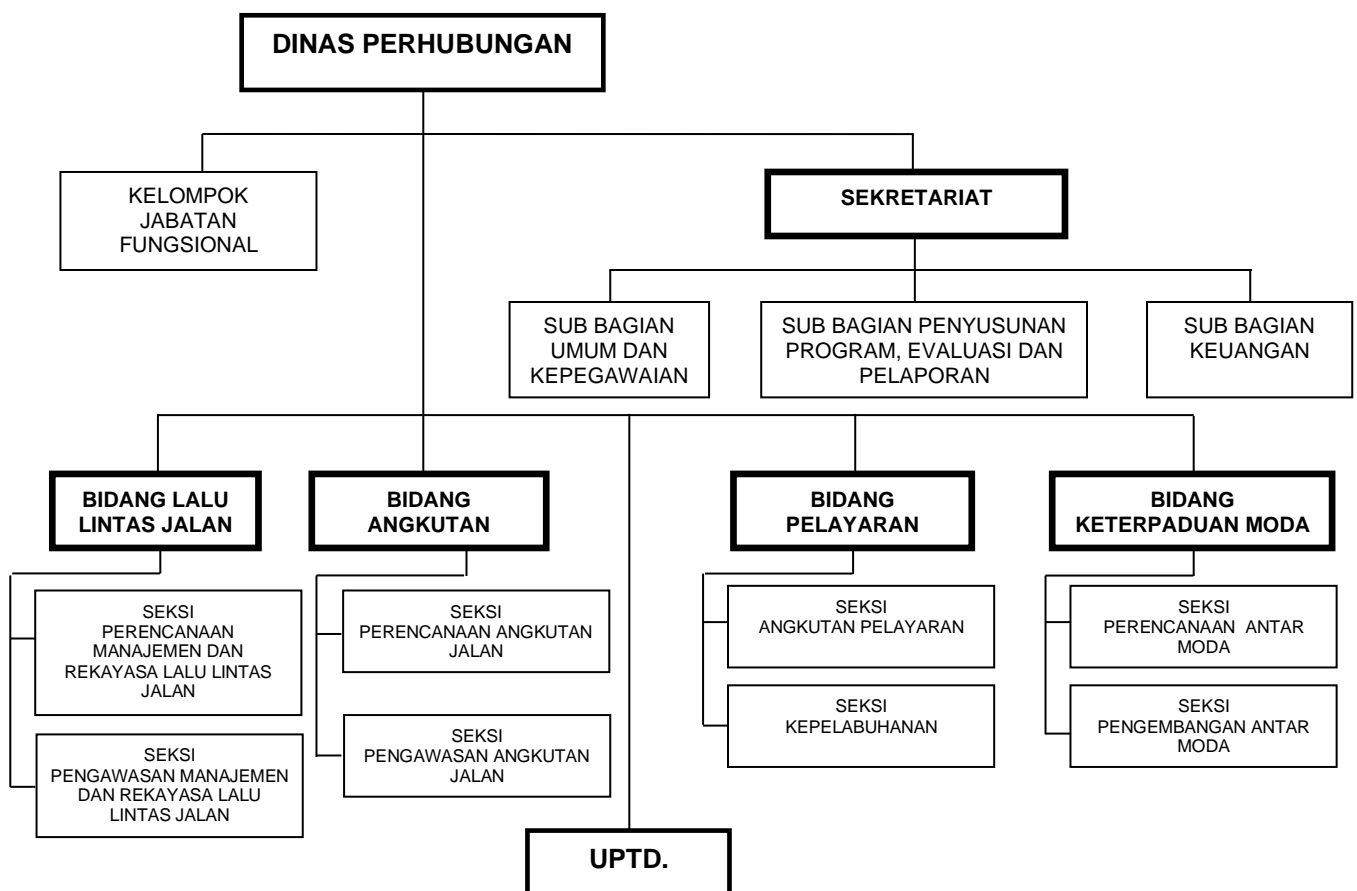


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



1. Seksi Perencanaan Antar Moda;
 2. Seksi Pengembangan Antar Moda;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

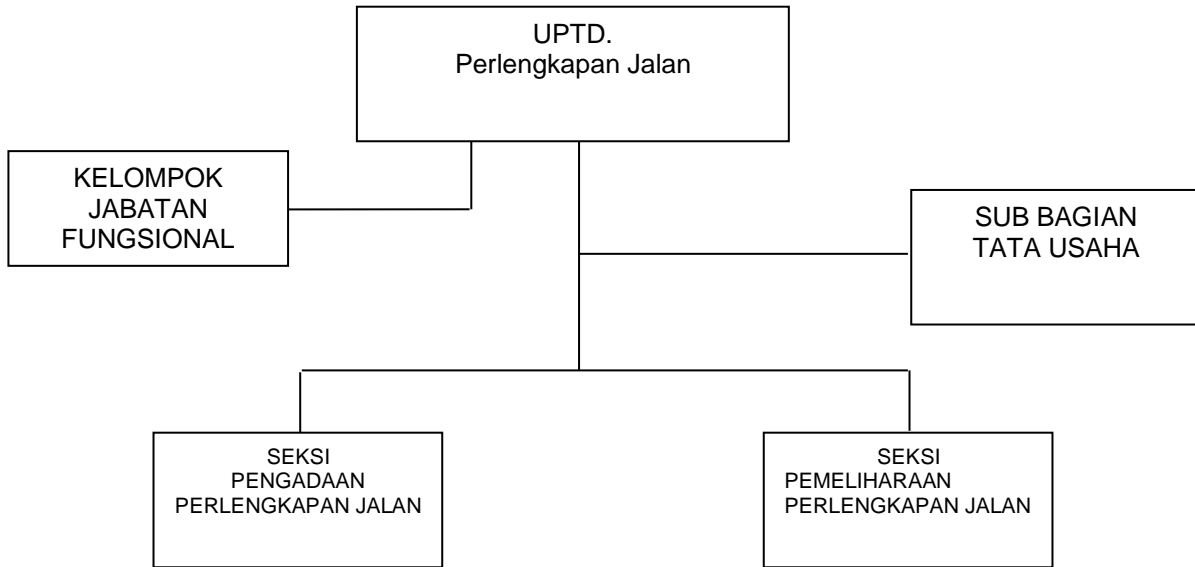
Secara lengkap diuraikan dalam struktur organisasi sebagai berikut



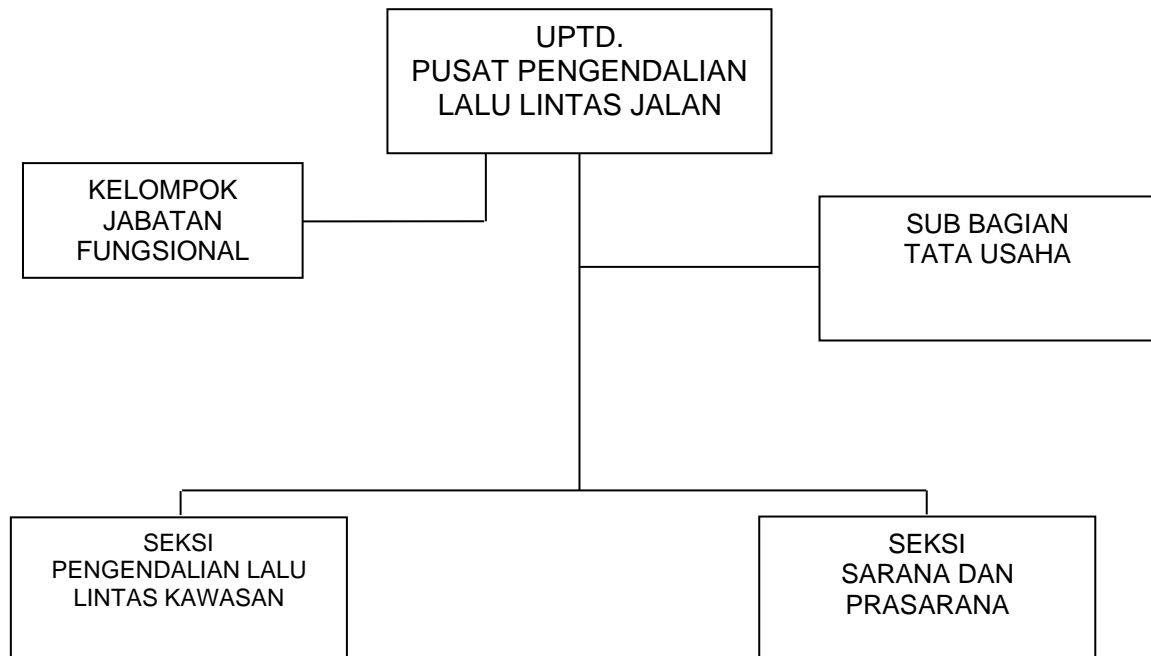
LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



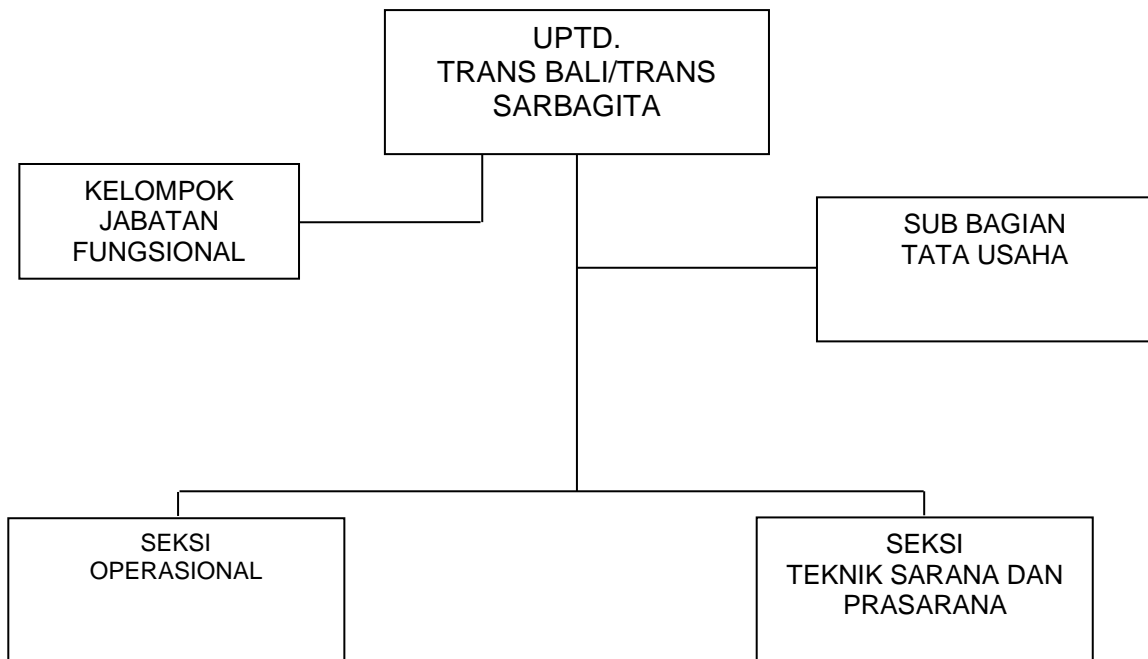
A. UPTD. PERLENGKAPAN JALAN



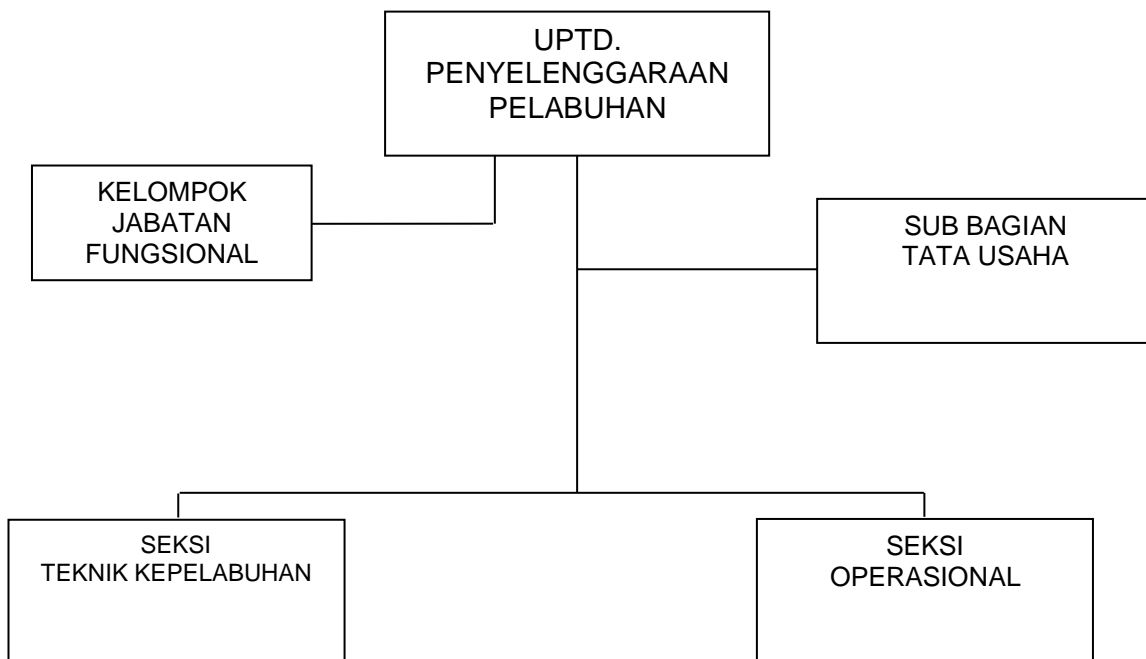
B. UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



C. UPTD. TRANS SARBAGITA



D. UPTD. PENYELENGGARAAN PELABUHAN



b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Rincian Tugas Pokok Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Isu Strategis (*STRATEGIC ISSUES*) sesuai Renstra RPD Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali

- a. Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas di daerah Kawasan sarbagita dan pusat-pusat kegiatan wisata,
- b. Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di provinsi bali,
- c. Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan dan Terminal)
- d. Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pengembangan serta konektivitas antar wilayah.

Kemudian Isu Strategis Dinas Perhubungan mengalami harmonisasi sesuai Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya konektivitas transportasi
- b. Terjadinya kemacetan lalu lintas
- c. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



d. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali

4. Sistematika Penyusunan LKJIP

- a. Bab I Pendahuluan, penjelasan umum organisasi terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Bali, kemudian dengan penekanan kepada aspek startegis atau permasalahan utama yang di hadapi Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian dan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali terhadap pencapaian sasaran strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya n-1.
- d. Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 dan memberikan saran/rekomendasi yang diperlukan dalam perbaikan kinerja Dinas Perhubungan dimasa yang akan datang.

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2024-2026 dan 2025-2029

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.

Terbitnya UU No. 59 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2045, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta, peningkatan daya saing daerah serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraannya dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah serta peluang dan tantangan dalam persaingan global.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada akhirnya hal ini berimplikasi terhadap kebijakan pada perangkat daerah (PD) agar segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan beserta turunannya.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terpilih dan dilantiknya Gubernur Bali periode 2025 – 2030, memperhatikan transisi regulasi dan relevansi ketentuan yang berlaku serta perubahan kebijakan yang

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



mendasar menjadikan *entry point* awal mula Renstra Perangkat Daerah (RPD) diharmonisasikan menjadi Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan. Dengan telah ditetapkan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai mekanisme yang berlaku, evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis pada perangkat daerah juga terus berproses menuju kearah yang lebih baik.

VISI DAN MISI

Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional.

Berdasarkan **Visi** RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Visi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu “ **Nangun Sat Kerthi Loka Bali** ”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam mempercepat pencapaian Visi diatas, juga dijabarkan kedalam Misi yang mengidentifikasi cara – cara untuk mewujudkan Misi. Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 terdapat 22 Misi yang didelegasikan kepada OPD sesuai Tupoksi.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 - 2023 mengacu pada **Misi Ke-18 ”Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali”**, diharmonisasikan pada RPJMD Semesta Berencana dalam Bali Era Baru maka misi Dinas Perhubungan Provinsi Bali yaitu **Misi ke-18 “Mengembangkan Infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi dan ramah lingkungan.** Dalam

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



mewujudkan Misi tersebut diatas Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuangkannya kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sesuai RPD Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia ”

Sasaran : Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi Provinsi Bali

Sasaran : Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali

Sasaran : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

Diharmonisasikan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan”

Sasaran : Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi Provinsi Bali

Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemacetan Lalu Lintas

Sasaran : Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum

Sasaran : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah

Sasaran : Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) apabila dalam penyelenggaraan transportasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai **regulator** dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing akan dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi.

Dengan demikian, misi tersebut secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.



2. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai RPD 2024-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35%
	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.88
	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	80
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	66
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73,45
	Indeks Kepuasan layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	43.75
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 33.025.006.400	APBD
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 15.246.672.949	APBD
Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 784.178.850	APBD
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 646.933.460	APBD

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan tahun anggaran 2025 sesuai dengan Renstra RPD Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra RPD Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35
	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.88
	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	80
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	66
	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73,45
	Indeks Kepuasan layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	43.75
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Rasio Konektivitas Layanan Transportasi di Kawasan Strategis Wilayah dan Kawasan Strategis lokal di Provinsi Bali	0,7
Menurunnya Tingkat Kemacetan Lalu Lintas	Rasio Tingkat Pelayanan Jalan (V/C Rasio) Jalan Provinsi	0,8
Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum	Jumlah Penggunaan Angkutan Umum	750.000
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah	Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan	43,74
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90

2. Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan Target dan Realisasi tahun 2025

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target dan realisasi di tahun 2025 sesuai Renstra RPD Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat digambarkan sesuai dengan tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase Lintasan Kereta api yang terbangun	75	35	-
		Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.86	0.88	0.70
		Persentase Aksesibilitas Pelayanan	75	80	80
2	Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65	66	70
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	72,51	73,45	74,55
		Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	82.5	83	84,23
		Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	50	50
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	38.58	43,75	41,84
4	Terwujudnya Akuntabilitas	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.85	83,90	84,10

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



	Capaian Kinerja				
--	-----------------	--	--	--	--

B. ANALISIS

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2025 sesuai dengan Renstra RPD dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Sasaran Pertama “Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	Smst I	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Persentase lintasan kereta api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	35	-	Program : Pengelolaan Perkereta apian	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Perkereta apian	-
	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0,88	0,70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Provinsi	79,54%
	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	80	80	Program Pengelolaan Pelayanan	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	100%

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1.1) tahun 2025 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- e. Persentase Lintasan Kereta api Wilayah Sarbagita yang Mendapatkan Kepastian Pembiayaan Program Pengelolaan Keretaapian

Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase lintasan kereta api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan pada Program Pengelolaan Perkereta apian yang diampu oleh Bidang Keterpaduan Moda yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dengan mewujudkan Infrastruktur Perhubungan yang memadai. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkereta apian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan penyusunan rencana induk perkereta apian pada Provinsi Bali. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2025

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



dengan anggaran sebesar Rp. 501.276.230 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 483.107.649 (96.38%), serta realisasi fisik (0%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase lintasan kereta api wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan komitmen pembiayaan}}{\text{Lintasan wilayah Sarbagita}} \times 100\%$$

Namun target pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkereta apian belum terealisasi karena secara fisik belum ada Konstruksi pembangunan lintasan kereta api di Bali, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bali hanya memiliki FS LRT jalur Bandara-Seminyak, FS Potensi Pengembangan Autonomous Rail Rapid Transit untuk Perbaikan Angkutan Umum Perkotaan oleh PT. KAI (Bandara-Sanur), FS dan SID Jalur Kereta api Lintasan Singaraja-Mengwi.

f. Rasio Konektivitas Layanan Angkutan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi rasio konektivitas layanan Angkutan dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui pemantauan dan sosialisasi. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi terdapat 2 sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi dan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi, Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan tersebut memiliki jumlah anggaran sebesar Rp. 216.395.017 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 216.195.017 (99,91%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Rasio konektivitas layanan Angkutan” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KSP yang terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah KSP yang harus dilayani}}$$

- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan dengan

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



anggaran sebesar Rp. 22.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.500.000 (95,56%), serta realisasi fisik (100%).

- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi terdapat 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian hasil andalalin dan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian hasil andalalin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait penilaian andalalin dengan anggaran sebesar Rp. 66.726.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.197.500 (64,74%), serta realisasi fisik (100%).

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan membuat rekomendasi hasil dampak andalalin yang terawasi. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 7.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000 (100%), serta realisasi fisik (100%).

g. Persentase Aksesibilitas Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diampu oleh Bidang Pelayaran yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Persentase Aksesibilitas Pelayaran dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui koordinasi dan pengawasan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditargetkan yakni Studi Amdal Pelabuhan Sangsit pada Bidang Pelayaran juga mengawasi, membina dan mengendalikan jaringan trayek pelayaran dengan menggunakan perhitungan target dibandingkan dengan realisasinya, maka dalam pelaksanaannya kegiatan ini target sasaran yaitu jaringan pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan sebanyak 20 (dua puluh) jaringan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Bidang Pelayaran bekerjasama dengan Unit Pelaksana Pembantu dan Dishub Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut, dimana dalam pelaksanaan kegiatan sasaran yang dicapai sudah memenuhi target, dimana Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut yang diawasi dan dibina sebanyak 50 (lima puluh) perusahaan. Pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional pada Tahun



2025 dengan anggaran sebesar Rp 527.945.725 dan realisasi keuangan sebesar Rp 440.963.500 (83,52%) , serta realisasi fisik (100%)

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional}} \times 100\%$$

1.2. Sasaran Kedua “Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali”

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2025	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Kualitas layanan transportasi di Provinsi bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66	70	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	106%
	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum Angkutan	73,45	74,55	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	101%
	Indeks kepuasan layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83	84,23	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50	50	Program : Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%



Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1.2) tahun 2025 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui pengawasan, penataan dan pemeliharaan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memelihara perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali dapat terehabilitasi dan terpelihara. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 596.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 366.693.529 (61,44%), serta realisasi fisik (100%).
- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, dengan Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar meningkatkan kelancaran pengguna jaringan jalan. Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 1.192.208.593 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.102.396.970 (92,47%), serta realisasi fisik (100%).

Target Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Bali yang berbasis ATCS diajabarkan dengan pedoman sebagai berikut:

- 1) Sesuai PM Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan tertuang pada tabel sbb:



Karakteristik Tingkat Pelayanan pada Persimpangan

Tingkat Pelayanan	Tundaan (Delay) (det/kend)
A	$\leq 5,0$
B	5,1 – 15
C	15,1 – 25
D	25,1 – 40
E	40,1 – 60
F	≥ 60

- **Tingkat Pelayanan A** : pergerakan yang lancar/sangat baik dan sebagian besar kendaraan tiba pada saat lampu hijau.
 - **Tingkat Pelayanan B** : pergerakan baik, kendaraan yang berhenti pada tingkat ini lebih banyak dari kendaraan pada LOS A.
 - **Tingkat Pelayanan C** : pergerakan yang kurang baik dan atau waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini.
 - **Tingkat Pelayanan D** : pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini. Akibat dari waktu siklus yang panjang atau rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan henti menurun.
 - **Tingkat Pelayanan E** : pergerakan yang buruk akibat dari nilai tundaan yang tinggi, biasanya menunjukkan nilai waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi.
 - **Tingkat Pelayanan F** : kondisi macet total atau ketika arus kedatangan melebihi kapasitas dari persimpangan tersebut.
- 2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 1) Menurut pasal 93 ayat 1 menyebutkan bahwa :
- a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



1. Penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
2. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
3. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
4. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
5. Pemaduan berbagai moda Angkutan;
6. Pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
7. Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
8. Perlindungan terhadap lingkungan.
9. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 1. Perencanaan;
 2. Pengaturan;
 3. Perencanaan;
 4. Pemberdayaan; dan
 5. Pengawasan.

b. Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh Bidang Angkutan Jalan, yang terbagi kedalam 2 seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimum Angkutan dengan sasaran Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali.

Adapun kegiatan pendukung sebagai berikut :

- Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengawasi pelaksanaan penertiban izin dalam penyelenggaraan pada Angkutan orang pada setiap trayek lintas baik dari Daerah maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, agar bagi penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek tersebut dapat memenuhi persyaratan perizinan.

Pelaksanaan kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 363.091.435 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 338.724.835 (93,29%), serta realisasi fisik (100%).

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek AntarKota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan sosialisasi dan uji coba dalam melakukan kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan.

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek AntarKota Dalam Daerah Provinsi dalam Perkotaan pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 70.876.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.179.800 (93,29%), serta realisasi fisik (100%).

C. Indeks kepuasan layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita, yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Indeks kepuasan terhadap layanan Angkutan umum perkotaan di Sarbagita dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui koordinasi dan pengawasan.

Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk penyediaan Angkutan Umum salah satunya Bus Sarbagita yang memiliki 2 koridor. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 65.065.269.141 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.431.485.806 (82,12%), serta realisasi fisik (100%).

Penjelasan dalam perumusan perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali “Indeks kepuasan layanan Angkutan umum perkotaan di Sarbagita” dari Skor Indeks kepuasan hasil survey terhadap penumpang Angkutan umum.

Transportasi Angkutan jalan saat ini masih dihadapkan dengan kondisi rendahnya penggunaan Angkutan umum dimana pangsa pasar Angkutan umum masih jauh dibawah persentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan. Hal itu terjadi karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan Angkutan umum juga karena kurang tersedianya Angkutan umum yang berkualitas.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa kemacetan di Kota Denpasar dan sekitarnya dipicu oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, yang memiliki faktor muat sangat rendah, sehingga penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Disamping itu pula,

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



pelayanan Angkutan umum masih buruk. Walaupun kini sudah dibangun jalan bebas hambatan Benoa – Ngurah Rai – Nusa Dua dan *underpass* Simpang Dewa Ruci yang diharapkan sebagai alternatif pemecah permasalahan transportasi kemacetan di wilayah Bali Selatan, tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan di Bali tetap dikembangkan (terpusat) di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA), maka permasalahan transportasi (baca kemacetan) tetap merupakan isu strategis bagi wilayah tersebut.

Untuk itu peningkatan pelayanan Angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas sehingga terciptanya keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan transportasi di wilayah Bali Selatan perlu diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep Terciptanya Lalu Lintas Yang Efisien khususnya di wilayah perkotaan atau aglomerasi SARBAGITA melalui peningkatan Angkutan umum massal.

Hal ini sesuai dengan amanat :

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 139 mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya Angkutan umum orang dan barang. Penyediaan *Public Transport* (AKAP, AKDP, Angkutan Perkotaan/Perdesaan) yang *akuntable* menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun undang-undang sebelumnya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tugas pemerintah adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (publik) melalui program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan SARBAGITA.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang layanan gratis Angkutan umum Trans Sarbagita untuk pelajar/mahasiswa.
- MoU antara Kementerian Perhubungan dengan Gubernur Bali dan Walikota / Bupati di wilayah SARBAGITA tanggal 2 Desember 2010 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah SARBAGITA.
- MoU antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepala Daerah di Wilayah SARBAGITA tanggal 21 Mei 2019 tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Pengoperasian Angkutan umum Trans SARBAGITA yang telah di *launching* pada Bulan Agustus 2011 berlanjut hingga saat ini, dan dalam Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” akan terus memberikan pelayanan terbaik pada *sektor* transportasi darat sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan penyediaan pelayanan Angkutan umum yang memadai dan mampu berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan, meningkatkan keselamatan, penghematan BBM untuk mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Handal (Aman, Nyaman, Tertib, Lancar, Efisien dan Terjangkau).

Dalam mewujudkan visi tersebut, telah disiapkan langkah-langkah sebagai misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan yaitu :

Misi Pertama Meningkatkan pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sebagai implimentasi dari Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Misi kedua adalah Mengoptimalkan Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui pembatasan penggunaan pribadi dan mampu memberikan prioritas bagi penggunaan Angkutan umum.

Misi ketiga adalah Meningkatkan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan Angkutan jalan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan jalan.

Dengan visi dan misi tersebut diatas diharapkan mampu mengurangi secara bertahap penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masyarakat mau beralih menggunakan Angkutan Umum Trans SARBAGITA sehingga dapat turut berkontribusi mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan. .

Berdasarkan hasil survey terhadap IKM dengan mengambil 9 unsur penilaian pada kedua koridor Trans Sarbagita bahwa dengan responden sebesar 110 orang diperoleh nilai IKM sebesar 84,23 dengan nilai A yang menunjukkan kinerja Angkutan umum Trans Sarbagita masih tergolong SEDANG sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Pengolahan Data SKM menggunakan excel oleh data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	PERNYATAAN	NILAI RATA-RATA	MUTU PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI
1	Informasi jurusan Angkutan umum Trans SARBAGITA sudah jelas dan terpasang dengan baik	3,57	89,29	A
2	Prosedur pelayanan bus trans sarbagita mudah dan sesuai untuk penumpang	3,49	87,14	A
3a	Waktu tempuh perjalanan Angkutan Trans SARBAGITA sudah ideal	3,29	82,14	A
3b	Layanan Operasional Angkutan Trans SARBAGITA sudah sesuai jadwal	3.37	84,29	A
3c	Waktu pelayanan antar bus sesuai kebutuhan penumpang	3.37	84,29	A
4	Tarif Angkutan umum Trans SARBAGITA sudah sesuai dan terjangkau	3.43	85,71	A
5	Kondisi didalam Bus sangat nyaman	3.20	80,00	B
6a	Pengemudi hanya menaikan dan menurunkan penumpang pada halte yang telah di tentukan	3.29	82.14	A
6b	Pramudi menjalankan bus dengan baik dan tertib lalu lintas	3.40	85.00	A
7	Pramujasa sudah melakukan tugasnya dengan baik dan ramah	3.57	89.29	A
8	Informasi layanan pengaduan, sarana dan masukan telah tersedia	3.31	82.86	A
9	Kondisi halte sangat baik dan sesuai peruntukannya	3.26	81.43	A
	Ketersediaan halte sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna	3.26	81.43	A
	RATA-RATA	3.37	84.23	A

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Angkutan umum Trans Sarbagita mendapat nilai **SANGAT BAIK**.

Perkembangan kinerja operasional Angkutan Umum Trans SARBAGITA berdasarkan jumlah penumpang pada tahun 2025 mencapai 86.608 orang. Terjadinya penurunan jumlah penumpang pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan dilakukan re-



routing pada Koridor II yang dimana awal mulanya beroperasi pada rute Kota – Nusa Dua menjadi Kota – Kota Gianyar, hal ini juga mempengaruhi *load factor* penumpang pada tahun 2025.

TABEL
JUMLAH PENUMPANG PER TAHUN SETIAP KORIDOR

TAHUN	KORIDOR I	KORIDOR II	TOTAL
2011	(belum ada)	1.411	1.411
2012	915	1.566	2.481
2013	847	1.356	2.203
2014	888	1.361	2.249
2015	782	1.527	2.309
2016	838	1.536	2.374
2017	753	1.307	2.060
2018	451	486	937
2019	538	328	866
2020	180	662	842
2021	553	502	1.055
2022	2.860	852	3.712
2023	3.254	1.047	4.301
2024	81.412	19.784	95.067
2025	69.837	16.771	86.608

Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadinya penyebaran wabah Corona Virus (Covid-19) di Provinsi Bali dan seluruh dunia. Kebijakan Provinsi Bali terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Bali sangat mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan jasa Angkutan Umum Trans Sarbagita salah satunya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dapat mempengaruhi tingkat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya Bus Trans Sarbagita. Jika melihat data rekap diatas pada tahun 2021 hingga 2024 situasi sudah mulai membaik. Untuk *load factor* koridor I dan II yang dikelola oleh UPTD Trans Sarbagita, pada tahun 2025 membukukan capaian *load factor* sebesar 24,30%.



TABEL LOAD FACTOR

TAHUN	LOAD FACTOR
2011	21,92%
2012	26,76%
2013	23,76%
2014	24,27%
2015	24,91%
2016	26,01%
2017	24,36%
2018	55,77%
2019	44,17%
2020	15,37%
2021	32,80%
2022	21,85%
2023	23,85%
2024	25,09%
2025	24,30%

Hubungan atau dampak dari perhitungan *Load factor* adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kapasitas, karena semakin meningkatnya *Load factor* maka terindikasi kapasitas mendekati maksimal. Bila dilihat dari sudut pandang pendapatan dari penjualan karcis/tiket bus Trans Sarbagita yang merupakan pendapatan dari jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, apabila kapasitas yang disediakan sama dan terjadi peningkatan *Load factor*, maka indikasi Pendapatan juga akan meningkat. atau berbanding lurus (pengecualian dari tahun 2019 diberlakukan kebijakan gratis untuk pelajar/mahasiswa).

Pendapatan per-tahun sejak dioperasikan dari tahun 2011 sd 2016 menunjukkan jumlah pendapatan operasional per-tahun yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 merupakan tahun dengan pencatatan pendapatan operasional tertinggi mencapai Rp.2.760.723.500. Namun jika dilihat dari data 3 tahun terakhir (2017, 2018 & 2019) kondisi ini mengalami perubahan dimana pada tahun 2017 mulai mengalami penurunan dengan pencatatan sebesar Rp.2.350.341.000 menurun pada tahun 2018 tercatat pencapaian sebesar Rp. 1.070.004.500, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 527.200.500 dan penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 112.017.500. Pendapatan Hasil Sewa BMD pada Bus sarbagita pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.025.000.000 dan

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



pendapatan 2023 menurun menjadi Rp. 178.862.100 untuk hasil penjualan tiket bus. Pendapatan Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 213.531.900, karena ditetapkan tarif baru sesuai Pergub Bali Nomor. 7 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor. 112 Tahun 2018 tentang tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali. Kemudian pada tahun 2025 pendapatan tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 261.755.014

TABEL
TOTAL PENDAPATAN

TAHUN	TOTAL
2011	620.012.500
2012	1.729.459.500
2013	2.543.417.500
2014	2.573.751.500
2015	2.658.709.500
2016	2.760.723.500
2017	2.350.341.000
2018	1.070.004.500
2019	527.200.500
2020	112.017.500
2021	46.704.000
2022	1.025.000.000
2023	178.862.100
2024	213.531.900
2025	261.755.014

Yang menjadi catatan sejak tahun 2023 seluruh koridor layanan Angkutan Trans Sarbagita terbagi menjadi 4 layanan, baik sebelum Koridor I (Kota – GWK) dan Koridor II (Kota – Nusa Dua), kemudian tambahan khusus untuk Layanan Angkutan Umum Denpasar – Bangli dan Layanan Pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita yang berjalan mulai bulan Maret 2023. Penentuan tarif pada koridor I, II dan layanan pendukung Angkutan Umum Trans Sarbagita dikenakan Rp 4.400 bagi penumpang umum dan bagi penumpang pelajar dikenakan Rp. 2.000, lalu untuk layanan Angkutan Denpasar – Bangli belum dikenakan biaya tarif (gratis).



D. Persentase Pelabuan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diampu oleh UPTD. Penyelenggaraan Pelabuan yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam upaya memenuhi Pelabuan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui Pengawasan pengoperasian Pelabuan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuan Pengumpan Regional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengawasan pengoperasian Pelabuan Pengumpan Regional yang tersedia. Pelaksanaan Pengawasan Operasional Pelabuan ini pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 56.582.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp 52.746.000, serta realisasi fisik (100%)

1.3. Sasaran Ketiga "Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali"

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2025	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	43,75	41,84	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	95,63%

A. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Bali

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diampu oleh UPTD. Perlengkapan Jalan yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi persentase sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan Angkutan jalan dalam kondisi baik dengan mewujudkan transportasi yang lancar melalui tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas jalan. Adapun kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, pada Sub Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menyediakan sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali, agar perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Bali dapat tersedia dengan baik. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pada tahun 2025

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



dengan anggaran sebesar Rp. 2.586.181.610 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.337.376.633(90,38%), serta realisasi fisik (100%).

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan agar penggunaan sarana prasarana perlengkapan jalan terpelihara/terehabilitasi dalam kondisi baik. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 840.412.420 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 773.809.792 (92,08%), serta realisasi fisik (100%).

➤ 1.4. Sasaran Ketiga "Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja"

SASARAN STRATEGIS		TAHUN	CAPAIAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2025	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90	84,10	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,63%

A. Sasaran Keempat "Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja"

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diampu oleh seluruh Sekretariat maupun UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, yang terbagi pada **Sekretariat** (Sub.Bagian Umum Kepegawaian, Sub.Bagian Keuangan, dan Sub.Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan), dan **UPTD** (Pusat Pengendalian LLAJ, Perlengkapan Jalan, Trans Bali/Trans Sarbagita, dan Penyelenggaraan Pelabuhan) yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam upaya memenuhi Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja melalui koordinasi dan sinkronisasi pengawasan. Pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang maupun UPTD. pada tahun 2025 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 33.419.926.317 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.492.404.532 (82,26%), serta realisasi fisik (100%).

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sesuai dengan kinerja utama Provinsi Bali, terdapat beberapa program prioritas dan unggulan yang menjadi catatan pada tahun 2025. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pada tahun 2025 memiliki Program peningkatan layanan Angkutan Trans Sarbagita yang masih berlanjut dengan di tetapkannya Peraturan Gubernur Nomor. 7 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran yang didalamnya terdapat beberapa kajian untuk rencana (Amdal pelabuhan Sangsit).

Keberhasilan program tidak terlepas daripada dukungan dari segenap unsur baik Pemerintah selaku regulator maupun Pengusaha dan Masyarakat pengguna. Perlunya analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi sangat penting untuk kesuksesan program ini selain dukungan daripada Pemerintah dalam bentuk anggaran untuk menunjang program. Adapun beberapa gambaran atas permasalahan maka dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan program Layanan Trans SARBAGITA dengan melihat kondisi layanan maka permasalahannya sebagai berikut:

Pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah penumpang yang dilayani dikarenakan adanya re-routing pada Koridor II yang awal mulanya melayani rute Kota-Nusadua menjadi Kota-Kota Gianyar.

Terdapat 3 halte yaitu Halte Sudirman 1, Halte Surapati 2 dan Halte Pesanggaran 1 yang batal dipelihara pada tahap 2 dikarenakan kendala pada proses e-katalog yang mana beberapa pekerjaan tidak tersedia pada sistem.

- Pelaksanaan Program Infrastruktur

Pada tahun 2024 dilakukan pengkajian terhadap rencana infrastruktur transportasi Bali. Beberapa kajian telah dilaksanakan baik pada APBD induk maupun pada APBD Perubahan. Kajian Amdal pelabuhan Sangsit, Yang menjadi catatan dimana dengan selesainya dokumen ini diharapkan adanya dukungan lanjutan dalam perencanaan fisik dan pembangunan kedepan.

- Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban terhadap pelanggaran perijinan Angkutan orang dan barang dengan kegiatan pengawasan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi

Masih tingginya angka pelanggaran menunjukkan masih belum efektifnya usaha yang telah dilakukan dan dibutuhkan inovasi agar pengusaha dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap Pemerintah.

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Analisis permasalahan dan solusi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dialami dalam melaksanakan urusan Perhubungan adalah :

1. Masih terjadinya kemacetan lalu lintas yaitu banyak pusat kegiatan/DTW yang tidak memiliki lokasi parkir yang memadai (*parking on street*), terjadinya agregasi kendaraan berat, kendaraan ringan, dan sepeda motor pada ruas jalan, pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan panjang luas jalan.
2. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali seperti terjadinya agregasi kendaraan berat, kendaraan ringan, dan sepeda motor pada ruas jalan, tingkat kepatuhan pengguna jalan dalam penggunaan APD rendah, fasilitas keselamatan, rambu, marka, dan penerangan jalan kurang.
3. Masih rendahnya penggunaan Angkutan umum. Jangkauan layanan Angkutan umum perkotaan masih rendah, *awareness* masyarakat terkait layanan transportasi *public* masih kurang, kualitas fasilitas bagi pejalan kaki belum baik, belum adanya kajian terkait kebutuhan layanan transportasi dan trayek Angkutan umum diluar wilayah SARBAGITA, serta kapasitas kelembagaan pengelola Angkutan umum yang kurang optimal.
4. Masih rendahnya konektivitas transportasi :
 - Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (Bandara, Pelabuhan, Jalan, dan Terminal), antara lain belum tersedianya terminal tipe B dan tidak ada Pelabuhan regional yang menjadi wewenang untuk dikelola oleh Provinsi.
 - Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah antara lain kurangnya informasi dan petunjuk layanan transportasi yang mudah diidentifikasi dan dipahami, jaringan *feeder* pada koridor LRT dan BRT yang beroperasi di Kota Denpasar dan sekitarnya belum tersedia, Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional di Bali Utara belum optimal

a. Solusi yang dapat ditempuh antara lain :

1. Peningkatan kapasitas parkir/terminal pada pusat kegiatan dan DTW, pengurangan *Parking on street*, peningkatan pemanfaatan kendaraan umum untuk jarak jauh, transformasi penggunaan Angkutan pribadi ke Angkutan umum.

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Peningkatan pemanfaatan kendaraan umum untuk jarak jauh, melakukan koordinasi penguatan regulasi mengenai pemanfaatan jalan umum terkait pakaian adat, siswa sekolah menengah, penggunaan kendaraan listrik berkecepatan rendah serta pemanfaatan angkutan barang sebagai angkutan penumpang, peningkatan kegiatan sosialisasi yang mengarah pada kelompok tertentu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
3. Merancang jaringan feeder untuk Angkutan umum, konsistensi keberlanjutan penyediaan layanan Angkutan umum massal di Provinsi Bali, peningkatan kegiatan sosialisasi dan informasi Angkutan umum, mendesign Pedestrian Oriented antar koridor, memberikan informasi terkait kebutuhan layanan transportasi dan trayek Angkutan umum diluar wilayah SARBAGITA, kemudian penyiapan halte khususnya pada titik-titik henti potensial bangkitan penumpang.
4. Menyusun kajian perencanaan pembentukan terminal tipe B, menindaklanjuti proses P3D Pelabuhan Nusa Dua
Penyediaan informasi dan petunjuk pelayanan transportasi yang dapat diakses secara realtime, merancang jaringan *feeder* untuk koridor LRT dan BRT, perlunya pengembangan Pelabuhan pengumpan regional dan keberlanjutan anggaran, dan Pengembangan Fasilitas Integrasi.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2025 antara Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Gubernur maka anggaran induk yang dikelola untuk mendukung kinerja dinas pada program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp. 33.025.006.400,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 15.246.672.949,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 784.178.850,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perkereta apian	Rp. 646.933.460,00	APBD
	Jumlah anggaran	Rp. 42.520.489.157,00	

Sejalan dengan perkembangan anggaran pada tahun 2025 terjadi pengurangan dan pergeseran anggaran pada perubahan APBD tahun 2025 dikarenakan rasionalisasi dan pengendalian belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut:

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp 33.025.006.400,00	Rp 33.419.926.317,00	Rp 27.492.404.532,00	82,26%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 15.246.672.949,00	Rp 71.027.660.216,00	Rp 58.690.759.882,00	82,63%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 784.178.850,00	Rp 527.945.725,00	Rp 493.709.500,00	84,46%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 646.933.460,00	Rp 501.276.230,00	Rp 483.107.649,00	96,37%
	Jumlah anggaran	Rp 49.702.791.659,00	Rp 105.533.390.688,00	Rp 87.600.945.063,00	86,43%

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran pada tahun ke-					
2020 (perubahan)	2021 (perubahan)	2022 (perubahan)	2023 (perubahan)	2024 (perubahan)	2025(perubahan)
12.921.291.473	26.895.197.905	30.439.092.618	48.309.852.629	42.520.489.157	105.533.390.688

Realisasi Anggaran pada tahun ke-					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.964.825.658	15.215.725.499	29.140.860.463	36.287.151.007	34.564.106.408	87.159.981.563

Ratio Serapan antara Realisasi dan Anggaran

Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
91,12	92,94	95,73	75,11	81,29	82,58

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Persentase Pertumbuhan Anggaran

Rata - rata pertumbuhan					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-20,03%	108,15%	13,18%	58,71%	81.29%	148,19%

Dengan kebijakan anggaran di tahun 2025 dimana Belanja Langsung (BL) di masukan dalam DPA perangkat daerah maka anggaran di Dinas Provinsi Bali mengalami kenaikan. Dengan kebijakan tersebut anggaran sebesar Rp. 105.533.390.688 terdiri dari Belanja Langsung. Anggaran pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 148% dibandingkan pada tahun 2024 yang dimana pada tahun tersebut anggaran yang di dapatkan sebesar Rp. 42.520.489.158. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 adanya penambahan anggaran dalam rangka menunjang layanan transportasi berupa layanan Angkutan Trans Metro Dewata sebesar Rp 57.127.264.982 pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025

Total Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebesar Rp. 105.533.390.688,00 (terdiri belanja Operasional dan belanja Modal)

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 4 Program yang diampu oleh 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

No	Nama Bidang	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Bidang Sekretariat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6	33.419.926.317,00	
2.	Bidang Angkutan Jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	8	71.027.660.216,00	
3.	Bidang Lalu Lintas Jalan				
4.	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ				
5.	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita				
6.	UPTD Perlengkapan Jalan				
7.	Bidang Keterpaduan Moda	Pengelolaan Perkereta apian	1	501.276.230,00	

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025

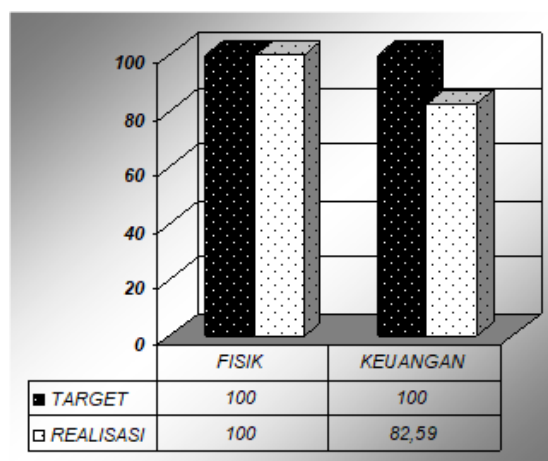


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



8.	Bidang Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran	2	584.527.925,00	
9.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan				
Jumlah			17	105.533.390.688,00	

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2025



Capaian/realisasi total dari pelaksanaan 4 Program dan 17 Kegiatan

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2025. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35%
	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.88
	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	66

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Provinsi Bali	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73,45
	Indeks Kepuasan layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kondisi Baik	43.75
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 3 (tiga) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi sesuai dengan Renstra (RPD) Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2024-2026.

Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut:



Tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2024-2026 adalah Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk Pelayanan Kelas Dunia dengan didukung beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	1.1. Persentase lintasan kereta api yang terbangun 1.2. Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat 1.3. Persentase Aksesibilitas Pelayanan

2. Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	2.1. Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional 2.2. Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan 2.3. Indeks Kepuasan layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita 2.4. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM

3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	3.1. Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik

4. Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja

SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	4.1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja



Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis maka perlu ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Penetapan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya akuntabilitas capaian kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

SASARAN STRATEGIS		TARGE T	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
		73,45		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota
				Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



				Trayek Lintas Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Indeks kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83		Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	43,75	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.88	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase Lintasan Kereta api yang terbangun	35%	Pengelolaan Perkereta apian	Penetapan Rencana Induk Perkereta apian



4. Program Pengelolaan Pelayaran

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Pelayaran Transportasi di Provinsi Bali	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80%	Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

SASARAN STRATEGIS		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025		
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50%	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas, dapat kami simpulkan bahwa;

- a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan sektor perhubungan.
- b. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2024-2026, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan antara Bapak Kepala Dinas Perhubungan terakhir dengan Bapak Gubernur Bali Yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target
Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35%
Rasio konektivitas layanan Angkutan Darat	0,88
Persentase Aksesibilitas Pelayanan	80
Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66
Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73,45
Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83
Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50
Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	43,75
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.90

- c. Hasil Akuntabilitas :

Capaian Kinerja Organisasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2025		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35%	0	0%
2	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0.88	0.70	79,50%
3	Persentase Aksesibilitas Pelayanan	80	80	100%

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Renstra SKPD Tahun 2025		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
4	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66	70	106%
5	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Angkutan	73,45	74,55	101%
6	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83	84,23	101%
7	Persentase Pelabuhaan Pengumpan Regional yang Operasinya Menerapkan SPM	50	50	100%
8	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	43,75	41,84	95,63%
9	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.90	84,10	100%

Efektivitas anggaran

Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran perubahan yang tersedia pada tahun 2025 sebesar Rp. 105.533.390.688 Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.159.981.563 atau 82,59%.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdiri atas 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pada Tahun 2023 Total Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal yang dikelola sebesar Rp. 105.533.390.688,00 untuk membiayai 4 Program pendukung dengan 17 Kegiatan didalamnya yang tersebar di Sekretariat, Bidang dan UPTD. dengan rekapitulasi secara sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	Rp 33.025.006.400,00	Rp 33.419.926.317,00	Rp 27.492.404.532,00	82,26%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 15.246.672.949,00	Rp 71.027.660.216,00	Rp 58.690.759.882,00	82,63%
3.	Program	Rp. 784.178.850,00	Rp 527.945.725,00	Rp 493.709.500,00	84,46%

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



	Pengelolaan Pelayaran				
4.	Program Pengelolaan Perkereta apian	Rp. 646.933.460,00	Rp 501.276.230,00	Rp 483.107.649,00	96.37%
	Jumlah anggaran	Rp 49.702.791.659,00	Rp 105.533.390.688,00	Rp 87.600.945.063,00	86,43%

2. SARAN

Dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait untuk sinergitas pelaksanaan program, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut:

1. Dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
2. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
3. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan penegakan hukum di bidang lalu lintas Angkutan jalan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PNS bidang Perhubungan.

Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan:

1. Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparatur dan masyarakat luas

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
7. Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI 2024 - 2026

Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Konektivitas Pelayanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase Lintasan Keretaapi yang Terbangun	$\frac{\text{Lintasan keretaapi wilayah Sarbagita yang mendapatkan komitmen pembiayaan}}{\text{Lintasan wilayah Sarbagita}} \times 100\%$	Bidang Keterpaduan Moda	Kepala Bidang Keterpaduan moda	
	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah KSP yang terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah KSP yang harus dilayani}}$	Bidang Angkutan Jalan	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi	
	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Rencana Pelabuhan}} \times 100\%$	Bidang Pelayaran	Kepala Bidang Pelayaran	
Terwujudnya Kualitas Layanan Transportasi di Provinsi Bali	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	$\frac{\text{Jumlah akses KSP yang mencapai waktu tempuh 2,5 jam/100km menuju jalan nasional}}{\text{Jumlah KSP}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas	
	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	$\frac{\text{Jumlah armada AKDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah total AKDP}} \times 100\%$	Bidang Angkutan Jalan	Kepala Bidang Angkutan Jalan	
	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional}} \times 100\%$	UPTD. Penyelenggaraan pelabuhan	Kepala UPTD Penyelenggaraan pelabuhan	
	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	Skor indeks kepuasan dari hasil survey terhadap penumpang angkutan umum	UPTD. Trans Bali / Trans Sarbagita	Kepala UPTD. Trans Bali/Trans Sarbagita	
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Bali	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah perhitungan rambu yang dipasang} + \text{estimasi pemasangan rambu}}{\text{Jumlah kebutuhan rambu}} \times 100\%$	UPTD. Perlengkapan Jalan	Kepala UPTD. Perlengkapan Jalan	

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Bali 2025 - 2030

NO	Tujuan	Indikator	Penjelasan/ Form Perhitungan	Satuan	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Transportasi Yang Handal, Berkeselamatan dan Ramah Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi(Terkait aspek Aman, Nyaman, Selamat dan Terjangkau)	Skor Indeks Kepuasan Dari Hasil Survey Terhadap Penumpang Angkutan Umum di Provinsi (Terkait aspek Aman, Nyaman, Selamat dan Terjangkau)	Indeks	77	77,5	78	78,5	79	80
NO	Sasaran	Indikator	Penjelasan/ Form Perhitungan	Satuan	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Konektivitas Layanan Transportasi Provinsi Bali	Rasio Konektivitas Layanan Transportasi di Kawasan Strategis Wilayah dan Kawasan Strategis lokal di Provinsi Bali	Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Daerah/Lokal yang Terlayani Angkutan Umum Dibandingkan dengan Jumlah Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Daerah/Lokal yang Ditetapkan	Rasio	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	1
2	Menurunnya Tingkat Kemacetan Lalu Lintas	Rasio Tingkat Pelayanan Jalan (V/C Rasio) Jalan Provinsi	Rasio Tingkat Pelayanan Jalan (V/C Rasio) adalah indikator yang digunakan dalam transportasi untuk menilai kinerja kapasitas jalan berdasarkan volume lalu lintas yang melintasi jalan tersebut dibandingkan dengan kapasitas maksimal jalan	%	0,8	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9
3	Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum	Jumlah Penggunaan Angkutan Umum	Data dashboard penumpang layanan Angkutan Massal Perkotaan di wilayah Sarbagita	orang/pnp	750000	825000	907500	998250	1098075	1207883
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Daerah	Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	43,74	49,48	55,21	60,95	66,68	72,42
5	Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Review SAKIP Inspektorat	Nilai	83,9	83,95	84	84,05	84,1	84,15

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Perhubungan	Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk kelas dunia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.90	84.10			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 dan SE. No 1526 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran	Melaksanakan sesuai arahan dan memperkuat Perencanaan	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	SE. Nomor 7084 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran		

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							2025		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Gaji, Tunjangan dan Administrasi Penyediaan Perlengkapan Kantor	2 dokumen	2 dokumen			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 orang/bulan	210 orang/bulan			
	Perhubungan	Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk pelayanan kelas dunia	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 dan SE. No 1526 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran	Melaksanakan sesuai arahan dan memperkuat Perencanaan	

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Perkantoran	6 dokumen	6 dokumen	SE. Nomor 7084 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 laporan	1 laporan			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				dan Konsultasi SKPD					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
	Perhubungan	Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk pelayanan kelas dunia	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan (Dihibahkan)	3 unit	3 unit	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 dan SE. No 1526 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran	Melaksanakan sesuai arahan dan memperkuat Perencanaan	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	SE. Nomor 7084 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit			
			Penyediaan Jasa	Jumlah Pelayanan	3	3			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Perkantoran	dokumen	dokumen			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia dan siap pakai	1 laporan	1 tahun			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 tahun			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	1 tahun			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Administrasi Perkantoran	3 dokumen	3 dokumen			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit			
	Perhubungan	Terwujudnya Transportasi yang Handal untuk pelayanan kelas dunia	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120 unit	120 unit	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 dan SE. No 1526 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran	Melaksanakan sesuai arahan dan memperkuat Perencanaan	

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	5 unit	5 unit	SE. Nomor 7084 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Darat	0,88 Rasio	0,70 Rasio			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan Jalan	2 Laporan	2 Laporan			
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 laporan	1 laporan			
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	1 laporan	1 laporan			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Provinsi					
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	6 Laporan	6 Laporan			
	Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 laporan	3 laporan	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 dan SE. No 1526 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran	Melaksanakan sesuai arahan dan memperkuat Perencanaan	
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	3 laporan	3 laporan	SE. Nomor 7084 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025		
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan	1 dokumen	1 dokumen			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Melampaui Batas 1 Daerah Kabupaten/Kota					
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen			
			Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi.	Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen			
			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	380 unit	380 unit			
	Perhubungan	Terwujudn	Program	Persentase Sarana	43,75	41,84			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	an	ya Transportasi yang Handal untuk pelayanan kelas dunia	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	persen	persen			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia	313 unit	313 unit			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	700 unit	700 unit	Adanya Inpres No.1 Tahun 2025 dan SE. No 1526 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran	Melaksanakan sesuai arahan dan memperkuat Perencanaan	
			Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	83 indek	84,23 indek	SE. Nomor 7084 Tahun 2025 Tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025		

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 Daerah Provinsi	85 unit	85 unit			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	66 persen	70 persen			
	Perhubungan	Terwujudnya Transportasi yang Handal, untuk pelayanan kelas dunia	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 laporan	1 laporan			
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase aksesibilitas pelayaran	80 persen	80 persen			
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 dokumen	1 dokumen			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Pengumpan yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 persen	50 persen			
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	19 laporan			
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	35 persen	0 persen	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian belum terealisasi karena secara fisik belum ada Konstruksi pembangunan lintasan kereta api di Bali, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bali hanya memiliki FS		

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



No	Urusan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							LRT jalur Bandara-Seminyak, FS Potensi Pengembangan Autonomous Rail Rapid Transit untuk Perbaikan Angkutan Umum Perkotaan oleh PT. KAI (Bandara-Sanur), FS dan SID Jalur Kereta api Lintasan Singaraja-Mengwi		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 dokumen	1 dokumen			

LKJIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

